

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

TAHUN 2019-2024



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun sebagai petunjuk serta pedoman dalam melakukan perencanaan tahunan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat yang efektif dan efisien.

Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024 ini merupakan kewajiban bagi perangkat daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan kinerja selama 5 (lima) tahun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019–2024 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah dilakukan upaya optimal melalui koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten agar dapat menghasilkan sebuah renstra yang dapat memberikan gambaran secara utuh terkait arah dan kebijakan pelayanan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh aparatur di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Harapan kami kiranya apa yang dikerjakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang Bermartabat.

Baa, 30 November 2021

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Rote Ndao,



Albeniaftes J. P. Siokain, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19850624 200312 1 001

DAFTAR TABEL	HALAMAN
2.1 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	11
2.2 PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
2.3 PNS Berdasarkan Jabatan Struktural	12
2.4 Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	13
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17
2.7 Analisis Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
3.2 Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao	25
3.3 Permasalahan Pelayanan Bagian Adm. Pemerintahan dan Kesra Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra dan Dinamika Lingkungan Strategis	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Tahun 2020 Adm, Pemerintahan dan Kesra	35
7.1 Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43

DAFTAR ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya.....	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	9
2.2.2 Sarana Prasarana	10
2.3. Kinerja Pelayanan	11
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Administrasi pemerintahan Dan Kesra	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	24
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao	24
3.3 Telaahan Renstra K/L	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	30
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
5.1 Strategi	31
5.2 Kebijakan	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Renstra disusun untuk mendukung RPJMD yang di implementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Perubahan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sampai tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja SKPD dalam pencapaian sasaran kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b. Kerangka dasar SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c. Alat bantu dalam memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- d. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu bagian yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang menduduki Jabatan Eselon III-a dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, maka Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki peran membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

1. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Penataan Daerah Otonomi Baru;
4. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok ***“Membuat rencana operasional di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kerjasama dan Otonomi Daerah”***

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

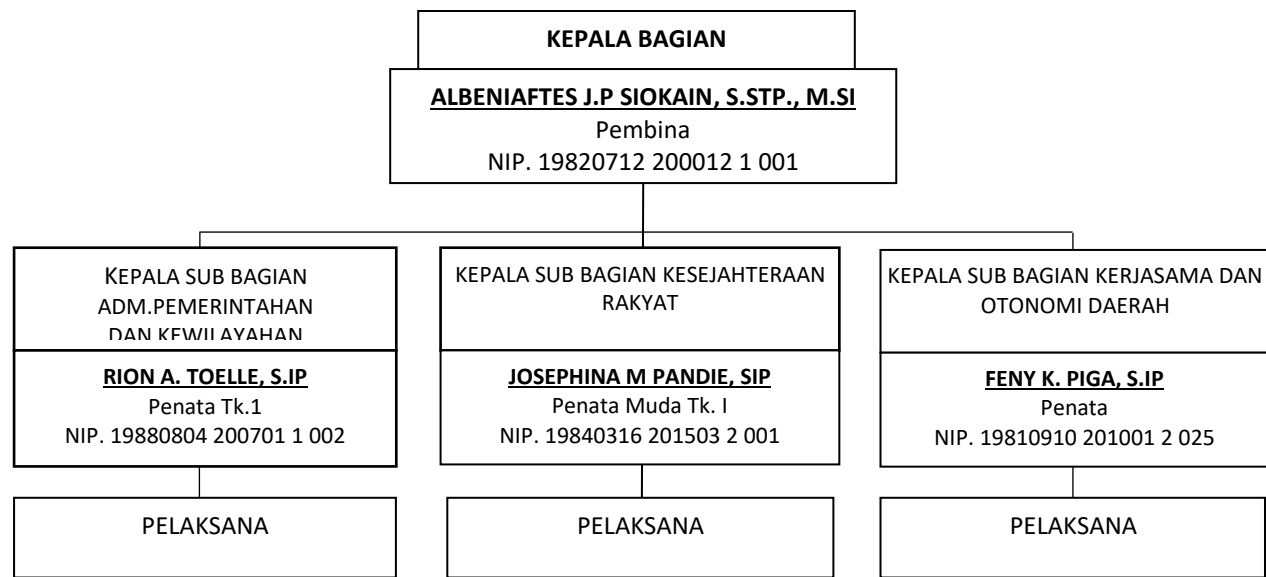
- Perencanaan operasional Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Pelaksanaan kebijakan operasional di bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Pembagian tugas, memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi tersebut dirumuskan dalam uraian tugas jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan rumusan tugas :
Merumuskan rencana operasional dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, Kesejahteraan Rakyat, Kerjasama dan Otonomi Daerah, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, dengan rumusan tugas :
Membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan;
- c. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah, dengan rumusan tugas :
Membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan;
- d. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan rumusan tugas :
Membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan;

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian yang didukung oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Gambar 2.
Bagan Struktur Organisasi
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao
(Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2020)



Bagan Struktur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao seperti tergambar di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur yang ada dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Disamping tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, juga terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya.

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Secara kualitas, sumber daya manusia aparatur yang tersedia pada Bagian Pemerintahan dan Kesra cukup memadai namun secara kuantitas belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara baik. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dengan kompleksitas permasalahan yang ditangani oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam tata pemerintahan di lingkungan Kabupaten Rote Ndao.

Sumber daya manusia yang dimiliki Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 adalah sebanyak 9 orang, yang terdiri dari :

- Tingkat Pendidikan Strata 2	: 1 orang
- Tingkat Pendidikan Strata 1	: 8 orang
- Tingkat Pendidikan Diploma 3	: - orang
- Tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat	: - orang
Jumlah	: 9 orang

Gambaran potensi sumber daya manusia aparatur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
2	Sarjana	5	3	8
3	Diploma III	-	-	0
4	SLTA	-	-	0
Jumlah		6	3	9

Tabel 2.2
PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina (IV/a)	1	-	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	1	-	1
3	Penata (III/c)	-	1	1
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	2	2
5	Penata Muda (III/a)	4	-	4
Jumlah		6	3	9

Tabel 2.3
PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Bagian	III A	1	-	1
2	Kepala Sub Bagian	IV A	1	2	3
JUMLAH			2	3	4

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana dan prasaranan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

URAIAN		2020	2019	Bertambah/ (Berkurang)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah		-	-	0,00
Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00	0,00
Kas di BULD		0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00	-
Beban dibayar dimuka		0,00	0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00	0,00
R/K SKPD		0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Permanen		0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00
ASET TETAP				
Tanah		1.471.633.600,00	1.471.633.600,00	0,00
Peralatan dan Mesin		685.178.900,00	743.328.900,00	(58.150.000,00)
Gedung dan Bangunan		8.596.469.293,00	9.339.738.293,00	(743.269.000)
Jalan, Jaringan dan Instalasi		166.452.500,00	166.452.500,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(1.206.049.393)	(1.025.549.415)	(180.499.978,00)
JUMLAH ASET TETAP		9.713.684.900,00	10.695.603.878,00	(981.918.978,00)
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00

ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	177.574.599,00	117.574.599,00	60.000.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	177.574.599,00	117.574.599,00	60.000.000,00
JUMLAH ASET	9.891.259.499,00	10.813.178.477,00	(921.918.978,00)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	-	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.739.633.707,00	0,00	2.739.633.707,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.739.633.707,00	0,00	2.739.633.707,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.739.633.707,00	0,00	2.739.633.707,00
EKUITAS DANA			
Ekuitas	7.151.625.792,00	10.813.178.477,00	(3.661.552.685,00)
JUMLAH EKUITAS DANA	7.151.625.792,00	10.813.178.477,00	(3.661.552.685,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.891.259.499,00	10.813.178.477,00	(921.918.978,00)

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan capaian-capaian penting yang telah dicapai pada periode RPJMD sebelumnya disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Ratio Capaian pada Tahun Ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah Pengadaan Pembebasan Tanah			21 Ha	6	3	4	4	4	0	6	4	1	0	0	0	100	133.3	25	0	0	0
2	Jumlah Pengadaan Konstruksi Pagar dan Pelataran			7 Unit	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Pengadaan Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Kantor			9 Unit	0	0	0	4	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25.0	0	0
4	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor			12 Unit	2	2	3	2	3	0	2	2	2	0	1	0	100	100	66.7	0	33.3	0
5	Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan/Rumah Dinas			14 Unit	0	2	7	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			12 Dok	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	2	100	100	100	100	75	100
7	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati			6 Dok	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	100	100	100	100	100	100
8	Tersedianya Dokumen Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD			40 Dok	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	100	100	100	75	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Ratio Capaian pada Tahun Ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Lengkap Pamong Praja			11 Keg	1	3	3	2	2	0	1	3	3	2	2	0	100	100	100	100	50	0
10	Jumlah Sertifikasi Tanah Pemda/Masyarakat			1718 Bidang	438	320	320	320	320	0	0	235	0	0	0	0	0	73.4	0	0	0	0
11	Jumlah Pembentukan Kecamatan Baru			4 Kec	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	50.0	100
12	Tersedianya Dokumen Pembakuan Rupa Bumi			1 Dok	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100	0	0	100
13	Tersedianya Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Bencana			5 Dok	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Kejadian Bencana Alam			5 Dok	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan PESPARAWI Tk. Kab maupun Tk. Nasional			24 Org/tim	10	2	0	10	2	0	10	2	0	11	2	0	100	100	0	110	100	0
16	Jumlah Peserta Kegiatan STQ/MTQ			21 Org	8	4	4	0	5	0	8	4	4	6	5	0	100	100	100	0	100	0
17	Jumlah Pengiriman Calon Jemaah Haji			37 Org	2	5	12	8	10	0	2	5	8	20	3	0	100	100	66.7	250	30	0
18	Jumlah Peserta Kegiatan Orang Muda Katholik			100 Org	0	50	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
19	Jumlah Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama			4 Keg	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	100	100	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Ratio Capaian pada Tahun Ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	Jumlah Workshop HIV/AIDS Tingkat Kabupaten Rote Ndao			5 Keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	100	100	0	100
21	Jumlah Rapat Koordinasi KOMDA Lansia			3 Keg	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0
22	Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial			4 Keg	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Rote Ndao

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,538,500	1,700,000	1,691,500	1,691,500	1,691,500	1.800.000	1,538,500	1,700,000	1,691,500	1,690,000	1,691,500	1.800.000	100	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6,000,000	9,000,000	15,658,800	15,658,800	15,658,800	12.000.000	5,244,701	9,000,000	15,658,800	15,658,300	15,658,800	9.916.966	87.41	100	100	100	100	83		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1,800,000	1,800,000	2,100,000	2,100,000	6,000,000	8.326.000	969,500	1,313,500	826,500	1,909,500	1,371,700	3.461.430	53.86	73	39	91	23	42		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46,371,000	56,400,000	76,100,000	82,802,000	82,796,000	85.646.000	46,366,000	56,382,000	76,073,000	82,770,000	82,790,000	85.260.000	99.99	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	575,000	600,000	696,355	696,355	700,000	1.124.000	575,000	600,000	696,355	696,355	700,000	1.124.000	100	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3,850,000	5,900,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	3.122.000	3,850,000	5,900,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	2.675.000	100	100	100	100	100	86		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,750,515	17,740,280	19,058,122	18,835,437	15,006,937	31.291.000	15,750,515	17,740,280	19,058,122	18,750,700	15,006,900	30.576.000	100	100	100	100	100	98		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,013,275	12,992,500	15,745,985	10,000,000	10,000,000	15.762.000	13,013,275	12,815,500	15,299,400	9,997,500	7,494,000	15.137.000	100	99	97	100	75	97		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,249,800	22,000,000	15,000,000	-	-	1.915.000	61,215,000	22,000,000	15,000,000	-	-	1.850.000	99.94	100	100	-	-	97		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	3,000,000	-	-	-		-	1,280,750	-	-	-		-	43	-	-	-			
Penyediaan Makan dan Minum Kantor	11,567,300	10,816,000	13,801,600	-	10,000,000		11,563,300	10,805,000	13,800,000	-	10,000,000		99.97	100	100	-	100			
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	113,040,000	84,035,000	85,150,000	104,100,000	103,810,000	9.400.550	110,279,200	46,848,853	54,554,000	104,098,226	103,522,478	9.290.400	97.56	56	64	100	100	100		

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	118,645,000	30,270,000	107,460,500	125,421,000	107,460,500	58.600.000	110,576,000	29,819,000	107,444,000	125,411,000	103,182,000	58.396.812	93.20	99	100	100	96	100		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT	41,060,000	164,154,669	52,639,000	107,907,000	81,752,000	133.351.000	41,060,000	146,191,800	52,639,000	107,671,457	75,690,467	133.351.000	100	89	100	100	93	100		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR																				
Pembangunan Gedung Kantor	2,840,946,700	4,195,389,700	3,590,420,500	-	-		1,739,613,300	3,049,744,993	3,584,645,500	-	-		61.23	73	100	-	-			
Pembangunan Rumah Jabatan	-	443,175,769	-	-	-		-	439,590,000	-	-	-		-	99	-	-	-			
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	-	-	-	75,000,000	-		-	-	-	75,000,000	-		-	-	-	100	-			
Pembangunan Gedung Serba Guna	-	-	-	-	750,000,000		-	-	-	-	743,769,000		-	-	-	-	99			
Pengadaan/Pembelian/Pembebasan Tanah	449,999,400	84,595,000	1,680,828,000	-	-		340,140,400	82,450,000	1,658,450,000	-	-		75.59	97	99	-	-			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26,437,805	29,339,495	23,519,495	20,308,026	29,448,026	23.935.000	26,432,070	29,039,878	23,509,878	20,295,400	29,439,000	23.000.000	99.98	99	100	100	100	97		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																				
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur	62,100,000	-	-	-	-		57,952,599	-	-	-	-		93.3	0	0	0	0			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																				
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	274,975,925	218,153,800	274,978,625	274,978,625	354,978,625	235.540.915	274,945,125	129,038,500	272,763,825	242,443,500	354,911,593	235.446.915	99.9	59	99	88	100	99		
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	91,018,025	102,600,000	102,400,000	105,000,000	205,000,000	109.092.200	90,943,025	101,806,000	102,000,000	104,999,915	201,729,400	108.790.200	99.9	99	100	100	98	99		
Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	121,550,000	126,300,000	150,000,000	155,000,000	165,000,000	165.000.000	121,545,000	119,835,200	149,091,200	124,491,300	161,792,800	161.975.600	100	95	99	80	98	99		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																				
Rapat Lengkap Pamong Praja	168,249,775	418,241,782	472,764,250	305,980,697	305,980,697		168,214,775	408,387,382	470,095,250	302,395,200	264,841,100		99.98	98	99	98.83	87			

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru																				
Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pengalihan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	472,764,250	-	-		-	-	470,095,250	-	-		-	-	99	-	-			
Fasilitasi Pembentukan Kecamatan	-	-	-	-	300,000,000	70.500.000	-	-	-	-	499,983,700	48.129.000	-	-	-	-	167	67		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																				
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	336,945,675	469,071,700	465,390,000	400,000,000	750,823,000	47.296.000	256,507,046	396,365,200	462,613,100	393,819,181	670,006,333	47.182.500	76.1	84	99	98	89	99		
Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama	-	36,539,000	-	-	-		-	35,321,000	-	-	-		-	97	-	-	-			
Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Beragama	-	-	-	85,000,000	62,200,000	72.000.000	-	-	-	65,300,000	62,200,000	43.589.000	-	-	-	77	100	61		
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat																				
Rapat Koordinasi Penanggulangan Masalah Kesejahteraan	37,510,600	-	29,000,000	-	-		36,450,600	-	29,000,000	-	-		97.17	-	100	-	-			
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS																				
Rapat Kerja Komisi Penanggulangan AIDS	185,777,100	138,542,350	109,842,350	128,000,000	77,510,915	78.500.000	171,408,492	125,489,975	107,442,300	124,835,000	77,500,000	78.499.000	92.27	90.58	97.82	97.53	99.99	99		
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan, Pemanfaatan Tanah																				
Sertifikasi Tanah Aset Pemda/Masyarakat	1,065,000,000	227,464,750	122,148,450	-	-		62,418,215	155,609,000	41,253,200	-	-		5.86	68	34	-	-			
Program Identifikasi dan Pemetaan Wilayah																				
Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi	-	-	100,000,000	-	-	71.104.000	-	-	93,228,000	-	-	71.045.000	-	-	93	-	-	99		

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan analisis lingkungan internal maupun external sehingga lebih menjamin keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu maka Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rote Ndao harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan tantangan.

Pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana berikut:

a. Tantangan

1. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi;
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dalam menunjang upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Kompetensi dan dukungan SDM yang belum memadai;
4. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
5. Tingkat mutasi keluar pegawai yang cukup tinggi;
6. Perbedaan pemahaman terhadap makna reformasi birokrasi;
7. Masih sering terjadi masalah sengketa tanah aset Pemerintah Daerah;
8. Kebutuhan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi;
9. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah.

b. Peluang

1. Adanya pedoman, norma, standar prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. Adanya komitmen pimpinan dari berbagai tingkatan untuk mendukung tercapainya visi dan misi;
3. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
4. Perkembangan sarana teknologi dan informasi yang memadai;
5. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
6. Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif;
7. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan cukup baik;
8. Kondisi perekonomian yang cukup stabil;
9. Adanya program reformasi birokrasi;
10. Kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dan menjaga kerukunan beragama cukup baik;

11. Penegakan disiplin cenderung meningkat;
12. Adanya mitra kerja (lintas program, sektor terkait) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Mengoptimalkan peluang yang ada diharapkan tantangan dapat diatasi sehingga kinerja pelayanan dapat meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Dalam merumuskan peluang dan tantangan tersebut Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao menggunakan teknik Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) atau Analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yakni :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan/identifikasi (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan Analisis SWOT. Berdasarkan analisi tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenghts) :

1. Adanya pedoman, norma, standar prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. Adanya komitmen pimpinan dari berbagai tingkatan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan;
3. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
4. Adanya hubungan komunikasi yang baik antar pegawai di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
5. Adanya komitmen dan etos kerja yang tinggi dari Pimpinan dan Staf di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra.

b. Kelemahan (Weakness) :

1. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi;
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dalam menunjang upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Kompetensi dan dukungan SDM yang belum memadai;
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal;
5. Tingkat mutasi keluar pegawai yang cukup tinggi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities) :

1. Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memungkinkan Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya perkembangan sarana teknologi dan informasi yang memadai yang memungkinkan terbukanya peluang mendapatkan informasi baru dan memudahkan terlaksananya komunikasi yang efektif dengan instansi di tingkat Provinsi;
3. Kondisi sosial, politik dan keamanan serta perekonomian yang cukup stabil dan kondusif;
4. Adanya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih optimal;
5. Kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dan menjaga kerukunan beragama cukup baik sehingga memungkinkan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif;
6. Adanya mitra kerja (lintas program, sektor terkait) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra.

b. Tantangan (Threats) :

1. Masih adanya perbedaan pemahaman terhadap makna reformasi birokrasi;
2. Masih sering terjadinya masalah sengketa tanah aset Pemerintah Daerah;
3. Kebutuhan akan adanya peningkatan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait legalitas sarana dan prasarana rumah ibadah;
5. Masih tingginya ego identitas (suku, agama dan ras) yang ada di masyarakat;
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats), maka dapat ditentukan strategi Bagian Pemerintahan dan Kesra melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut :

- Strategi SO, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang;
- Strategi ST, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menghindari tantangan;
- Strategi WO, yaitu meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang;
- Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman Strategi dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Analisis Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

			KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)
	ALI ALE	1. 2. 3. 4. 5.	Adanya pedoman, norma, standar prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; Adanya komitmen pimpinan dari berbagai tingkatan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan; Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas-tugas; Adanya hubungan komunikasi yang baik antar pegawai di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra; Adanya komitmen dan etos kerja yang tinggi dari Pimpinan dan Staf di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra.	1. 2. 3. 4. 5.	Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi; Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dalam menunjang upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Kompetensi dan dukungan SDM yang belum memadai; Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal; Tingkat mutasi keluar pegawai yang cukup tinggi;
	PELUANG (O)		S + O		W + O
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memungkinkan Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Adanya perkembangan sarana teknologi dan informasi yang memadai yang memungkinkan terbukanya peluang mendapatkan informasi baru dan memudahkan terlaksananya komunikasi yang efektif dengan instansi di tingkat Provinsi; Kondisi sosial, politik dan keamanan serta perekonomian yang cukup stabil dan kondusif; Adanya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih optimal; Kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dan menjaga kerukunan beragama cukup baik sehingga memungkinkan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif; Adanya mitra kerja (lintas program, sektor terkait) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra.	1. 2. 3. 4. 5.	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Gevernment); Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja; Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisiensi dan transparan; Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas; Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam meningkatkan dan penataan tugas dan fungsi.	1. 2. 3.	Membangun koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait tugas pokok dan fungsi serta membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan prima; Penambahan Sumber Daya Aparatur dalam menjawab tuntutan tugas dan beban kerja; Membangun Profesionalisme aparatur melalui program pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme;
	TANTANGAN (T)		S + T		W + T
1. 2.	Masih adanya perbedaan pemahaman terhadap makna reformasi birokrasi; Masih sering terjadinya masalah sengketa tanah aset	1.	Meningkatkan transparansi dan koordinasi dalam pengembangan dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;	1.	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas; Menerapkan pola kerja dan pola

3.	Pemerintah Daerah;		Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk pendataan dan sertifikasi tanah Pemda.	2.	pembinaan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao;
4.	Kebutuhan akan adanya peningkatan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi;	2.			
5.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait legalitas sarana dan prasarana rumah ibadah;	3	Meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan.		
6.	Masih tingginya ego identitas (suku, agama dan ras) yang ada di masyarakat;				
	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.				

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang dijabarkan dalam uraian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan rakyat	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
			Koordinasi antar sektor masih lemah
			Implementasi kebijakan di tataran pelaksana belum berjalan optimal
		Masih tingginya angka permasalahan kesejahteraan rakyat di daerah	Kurangnya inovasi dan kreasi
			Pelaksanaan program dan kegiatan belum tepat sasaran dan tepat manfaat
			Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program-program Pemerintah secara optimal masih rendah
		Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tidak tepat waktu	Sistem kontrol internal OPD masih rendah
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Tingginya beban kerja aparatur sebagai akibat dari rangkap tugas dan rangkap jabatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao

Penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao adalah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi serta Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2019-2024, yaitu :

- a. Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT (Bertumbuh, Makmur, Taat dan Bersahabat) secara Berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.
- b. Misi

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui penjabaran dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan.
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao

Visi :				
“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan yang bertumpu pada pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.				
Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao :				
Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima				
No	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dalam memahami regulasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Kurangnya koordinasi antar OPD	Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government)

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan misi keempat, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, maka Pemerintahan kabupaten Rote Ndao melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka secara vertikal Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berhubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga diperlukan penelaahan terhadap visi, misi dan sasaran Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu : “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bagian Adm. Pemerintahan dan Kesra
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat	Terbatasnya sumber daya manusia dan sumber pendanaan	Adanya peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, dan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rencana Ruang	Pola Ruang	Indikator Program	Pengaruh Rencana Penataan Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arahan Pengendalian Pelayanan
1	Kawasan Lindung	Sesuai Peta	-	-	-
2	Kawasan Budidaya	Sesuai Peta	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi : rencana pola ruang wilayah meliputi :

- a. Kawasan lindung
- b. Kawasan budidaya

Kemungkinan yang paling kuat berpengaruh dari rencana tata ruang wilayah ini terhadap pelayanan Bagian Pemerintahan dan Ksesjahteraan Rakyat adalah kawasan budidaya, namun dengan tidak adanya indikasi program maka pengaruh rencana penataan ruang terhadap kebutuhan pelayanan dan arah pelayanan maka kegiatan pelayanan pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tidak mengganggu tata ruang wilayah lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Bagian Pemerintahan dan Kesra dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019-2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi dan Nasional. Metode penentuan isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesra yakni melalui analisis aktual, urgensi, relevansi dan dampak. Secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemerintahan yang layak;
5. Kebutuhan peningkatan akses pelayanan dalam rangka memperkecil rentang kendali pemerintahan.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang berimplikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Memmpercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan hingga kecamatan dan kelurahan;
5. Pembentukan Kecamatan baru sebagai bagian dari peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Bagian Pemerintahan dan Kesra dan Dinamika Lingkungan Strategis

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
2	Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3	Belum efektifnya penyelenggaraan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan
- Tujuan jangka menengah Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao yaitu mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat yang fektif dan efisien.
2. Sasaran
- Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang efektif dan efesien				100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	ST	ST	ST	ST
			2.	Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra yang berkontribusi langsung atau tidak langsung adalah misi 4 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima. Maka hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan serta sebagai instrumen pengukuran pencapaian kinerja secara terukur.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

1.1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, maka ditetapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rote Ndao untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat;
5. Infentarisasi, verifikasi, pembakuan serta pembinaan data dan bahan unsur-unsur kewilayahan.

1.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan dengan strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang ditempuh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

1. Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi penyelenggara urusan pemerintahan;
2. Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Penataan Kecamatan;
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dan;
6. Fasilitasi dan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk administrasi pertanahan dan pembakuan nama rupa bumi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	<i>Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan.</i>		
Misi 4.	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat yang efektif dan efisien		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi penyelenggara urusan pemerintahan.
			2. Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah	2. Pembinaan Dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			3. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan	3. Penataan Kecamatan
			4. Meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat	4. Fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
				5. Peningkatan pemberian bantuan sosial rumah ibadah dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
		5. Infentarisasi, verifikasi, pembakuan serta pembinaan data dan bahan unsur-unsur kewilayahan	6. Fasilitasi dan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk administrasi pertanahan dan pembakuan nama rupa bumi	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Program prioritas penetapannya mengacu pada program pada RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Rote Ndao selanjutnya dijabarkan pada rencana program dan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai unit pelaksana kegiatan. Dengan adanya perencanaan yang baik terhadap program dan kegiatan yang ada diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan di bidang peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihadapi.

Adapun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - g. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesra.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun 2020
Setda Kabupaten Rote Ndao

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
						2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
						Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
			PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp 416.413.550	100%	Rp 416.413.550	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.1 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya barang dan jasa	60 Bln	12 Bln	Rp 62.577.000	12 Bln	Rp 62.577.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor		1 Unit	Rp 1.915.000	1 Unit	Rp 1.915.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya dukungan sarana prasarana kantor	16 unit	16 Unit	Rp 35.383.000	16 Unit	Rp 35.383.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	6 Org	6 org	Rp 85.646.000	6 org	Rp 85.646.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.5 Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	7 Dok	7 Dok	Rp 10.000.000	7 Dok	Rp 10.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tertib aparatur	12 Org	12 Org	Rp 5.625.000	12 Org	Rp 5.625.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.7 Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	-	129 kali	Rp 215.267.550	129 kali	Rp 215.267.550	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.8 Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Aula, Selasar, Pelataran, dan Pagar	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Camat, Rumah Dinas, dan pagar	1 Unit	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN: 1.9 Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas, Aula, Selasar, Pelataran, dan Pagar	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Kelurahan dan Rumah Dinas camat	1 Unit	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

										PROGRAM :	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%	Rp 2.434.693.615	100%	Rp 2.434.693.615	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.1	Rapat Lengkap Pamong Praja	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	11 Kegiatan	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.2	Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	Meningkatnya koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	38 Dok	8 Dok	Rp 165.000.000	8 Dok	Rp 165.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.3	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksanya pembinaan administrasi terpadu kecamatan	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya dokumen LPPD dan Pemuatan LPPD	11 Dok	2 Dok	Rp 235.540.915	2 Dok	Rp 235.540.915	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Tersedianya dokumen LKPJ Bupati	6 Dok	1 Dok	Rp 109.092.200	1 Dok	Rp 109.092.200	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.6	Penyusunan Laporan Standar Pelyanan Minimal (SPM) Kepala Daerah	Tersedianya Pelaporan dan Peraturan SPM Kepala Daerah	5 Dok	1 Dok	Rp 85.000.000	1 Dok	Rp 85.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.7	Fasilitasi Pembentukan Kecamatan	Terlaksanyanya pemekaran/pembentukan kecamatan baru	1 Kec	1 Kec	Rp 70.500.000	1 Kec	Rp 70.500.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.8	Monitorig, Evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	1 Dok	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
										KEGIATAN:	1.9	Pemberian Beasiswa	Terlaksananya pemberian bantuan beasiswa	1900 Orang	380 org	Rp 1.500.660.500	380 org	Rp 1.500.660.500	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
													Terlaksananya Pendampingan bagi MAhasiswa Calaan Penerima Beasiswa							
										KEGIATAN:	1.10	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesos	20 Keg	1 Keg	Rp 47.296.000	1 Keg	Rp 47.296.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

									KEGIATAN:	1.11	Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Umat Beragama	Terlaksananya pembinaan mental spiritual umat beragama	2 Lembaga	3 Lembaga	Rp 72.000.000	3 Lembaga	Rp 72.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
									KEGIATAN:	1.12	Rapat Kerja Komisi Penanggulangan AIDS	Tersedianya operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Rote Ndao	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 78.500.000	1 Lembaga	Rp 78.500.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
									KEGIATAN:	1.13	Pembinaan dan Pembakuan Rupa Bumi unsur alami	Tersedianya data Penamaan Pulau-Pulau di Wilayah Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
									KEGIATAN:	1.14	Pembinaan dan Pembakuan Rupa Bumi unsur buatan	Tersedianya data pembakuan ruma bumi unsur buatan	1 Dok	1 Dok	Rp 71.104.000	1 Dok	Rp 71.104.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
									KEGIATAN:	1.15	Pelatihan ketrampilan Berbahasa	Terlaksananya kursus Bahasa Inggris bagi Lulusan SMA, Diploma dan Sarjana	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
												Jumlah							

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN		Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI	
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD				
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)			
			PROGRAM :	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%	Rp 2.591.046.000	100%	Rp 5.896.360.000	100%	Rp 5.379.122.000	100%	Rp 959.295.200	100%	Rp 12.825.823.200	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		19 Dok	Rp 19.200.000	19 Dok	Rp 21.120.000	19 Dok	Rp 23.232.000	19 Dok	Rp 25.555.200	76 dok	Rp 89.107.200	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD	12 Dok	12 Dok	Rp 4.000.000	12 Dok	Rp 4.400.000	12 Dok	Rp 5.000.000	12 Dok	Rp 5.500.000	48 dok	Rp 18.900.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	20 Kali	20 Kali	Rp 10.200.000	20 Kali	Rp 11.220.000	20 Kali	Rp 12.300.000	20 Kali	Rp 13.200.000	80 Dok	Rp 46.920.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja Per Triwulan	7 Dok	7 Dok	Rp 5.000.000	7 Dok	Rp 5.500.000	7 Dok	Rp 6.000.000	7 Dok	Rp 6.500.000	28 Dok	Rp 23.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	-	5 Orang	Rp 80.610.000	6 Orang	Rp 90.000.000	6 Orang	Rp 95.000.000	6 Orang	Rp 100.000.000	23 orang	Rp 365.610.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	4 Orang	5 Orang	Rp 80.610.000	6 Orang	Rp 90.000.000	6 Orang	Rp 95.000.000	6 Orang	Rp 100.000.000	23 orang	Rp 365.610.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

			KEGIATAN :	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	3 Orang	Rp 23.400.000	4 Orang	Rp 26.000.000	4 Orang	Rp 27.000.000	4 Orang	Rp 28.000.000	15 Orang	Rp 104.400.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD	2 Orang	3 Orang	Rp 23.400.000	4 Orang	Rp 26.000.000	4 Orang	Rp 27.000.000	4 Orang	Rp 28.000.000	15 Orang	Rp 104.400.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah		4 Orang	Rp 60.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	19 Orang	Rp 285.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	4 Orang	4 Orang	Rp 60.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	5 Orang	Rp 75.000.000	19 Orang	Rp 285.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adm. Keuangan Perangkat Daerah	-	-	Rp 211.786.000	-	Rp 233.240.000	-	Rp 253.090.000	-	Rp 269.440.000	-	Rp 967.556.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	3 Unit	Rp 10.000.000	3 Unit	Rp 15.000.000	3 Unit	Rp 20.000.000	3 Unit	Rp 25.000.000	12 Unit	Rp 70.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	5.2	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia Barang Cetakan dan Penggandaan	62 Buku	62 Buku	Rp 14.000.000	62 Buku	Rp 15.500.000	62 Buku	Rp 15.000.000	62 Buku	Rp 15.500.000	248 Buku	Rp 60.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	5.3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	12 Bln	12 Bln	Rp 31.136.000	12 Bln	Rp 33.000.000	12 Bln	Rp 34.000.000	12 Bln	Rp 35.000.000	48 Bln	Rp 133.136.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	12 Bln	Rp 710.000	12 Bln	Rp 800.000	12 Bln	Rp 900.000	12 Bln	Rp 1.000.000	48 Bln	Rp 3.410.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	30 Kali	30 Kali	Rp 125.000.000	30 Kali	Rp 137.500.000	30 Kali	Rp 151.250.000	30 Kali	Rp 160.500.000	120 Kali	Rp 574.250.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20 Kali	20 Kali	Rp 30.940.000	20 Kali	Rp 31.440.000	20 Kali	Rp 31.940.000	20 Kali	Rp 32.440.000	80 Kali	Rp 126.760.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Rp. 2.000.000.000	1 Unit	Rp 5.100.000.000	1 Unit	Rp 4.500.000.000	1 Unit	-	4 Unit	Rp 9.600.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

			SUB KEGIATAN :	6.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Kantor Camat Pantai Baru	-	-	-	1 Unit	Rp 2.500.000.000	1 Unit	Rp 4.500.000.000	1 Unit	-	4 Unit	Rp 7.000.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			Pembangunan Kantor Camat Loaholu	-	1 Unit	Rp 2.000.000.000	1 Unit	Rp 2.000.000.000	-	-	-	-	1 Unit	Rp 4.000.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO			
			Pembangunan Mushola lingkungan kantor Bupati	-	-	-	1 Unit	Rp 600.000.000	-	-	-	-	1 Unit	Rp 600.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO			
			KEGIATAN :	7	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	12 Bln	Rp 14.400.000	12 Bln	Rp 16.100.000	12 Bln	Rp 17.800.000	12 Bln	Rp 19.800.000	48 Bln	Rp 68.100.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai Surat Menyurat	12 Bln	12 Bln	Rp 1.800.000	12 Bln	Rp 2.300.000	12 Bln	Rp 2.800.000	12 Bln	Rp 3.300.000	48 Bln	Rp 10.200.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, listrik dan air	12 Bln	12 Bln	Rp 12.600.000	12 Bln	Rp 13.800.000	12 Bln	Rp 15.000.000	12 Bln	Rp 16.500.000	48 Bln	Rp 57.900.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	Rp 181.650.000	-	Rp 334.900.000	-	Rp 388.000.000	-	Rp 441.500.000	-	Rp 1.346.050.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	1 Unit	Rp 24.000.000	1 Unit	Rp 26.400.000	1 Unit	Rp 29.000.000	1 Unit	Rp 32.000.000	4 Unit	Rp 111.400.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (1 Mobil, 8 Motor)	10 Unit	10 Unit	Rp 3.650.000	10 Unit	Rp 4.000.000	10 Unit	Rp 4.000.000	10 Unit	Rp 4.000.000	40 Unit	Rp 15.650.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO			
			SUB KEGIATAN :	8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja	12 Unit	12 Unit	Rp 4.000.000	12 Unit	Rp 4.500.000	12 Unit	Rp 5.000.000	12 Unit	Rp 5.500.000	48 Unit	Rp 19.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Kantor Camat Rote Timur, Rote Barat, Ndao Nuse, Kelurahan Metina, Kelurahan Londalusi	-	1 Unit	Rp 150.000.000	1 Unit	Rp 300.000.000	1 Unit	Rp 350.000.000	1 Unit	Rp 400.000.000	4 unit	Rp 1.200.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

			PROGRAM:	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	-	-	Rp 4.795.620.450	-	Rp 5.035.401.000	-	Rp 5.287.171.000	-	Rp 5.551.530.000	-	Rp 20.669.722.450	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	-	-	Rp 1.030.000.000	-	Rp 1.210.401.000	-	Rp 1.372.171.000	-	Rp 1.576.530.000	-	Rp 5.189.102.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Lengkap Pamong Praja	-	1 Kali	Rp 200.000.000	1 Kali	Rp 200.000.000	1 Kali	Rp 200.000.000	1 Kali	Rp 250.000.000	4 Kali	Rp 850.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	6 Dok	6 Dok	Rp 165.000.000	6 Dok	Rp 205.000.000	6 Dok	Rp 225.000.000	6 Dok	Rp 245.000.000	24 Dok	Rp 840.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Terlaksananya pembinaan administrasi terpadu kecamatan (Paten)	-	-	-	11 dok	Rp 150.000.000	11 dok	Rp 180.000.000	11 dok	Rp 250.000.000	33 dok	Rp 580.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyediaan Data Pembakuan Rupa Bumi Unsur Buatan	1 Dok	1 Dok	Rp 65.000.000	1 Dok	Rp 75.000.000	1 Dok	Rp 110.000.000	1 Dok	Rp 150.000.000	4 Dok	Rp 400.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	1.3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) dan Pemuatan RLPPD	2 Dok	2 Dok	Rp 300.000.000	2 Dok	Rp 300.000.000	2 Dok	Rp 310.000.000	2 Dok	Rp 320.000.000	8 Dok	Rp 1.230.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Penyediaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU) Bupati	1 Dok	1 Dok	Rp 140.000.000	1 Dok	Rp 130.401.000	1 Dok	Rp 177.171.000	1 Dok	Rp 181.530.000	4 Dok	Rp 629.102.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Penyusunan Laporan SPM dan Perbub Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM	2 Dok	2 Dok	Rp 160.000.000	2 Dok	Rp 150.000.000	2 Dok	Rp 170.000.000	2 Dok	Rp 180.000.000	8 Dok	Rp 660.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			KEGIATAN :	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		-	Rp 3.765.620.450	-	Rp 3.825.000.000	-	Rp 3.915.000.000	-	Rp 3.975.000.000	-	Rp 15.480.620.450	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Pesprawi, Jamaah Haji, MTQ, Ziarah Rohani, STQ	-	4 Keg	Rp 482.120.450	5 Keg	Rp 500.000.000	5 Keg	Rp 520.000.000	5 Keg	Rp 525.000.000	19 Keg	Rp 2.027.120.450	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

					Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Beragama	2 Lem	3 Lem	Rp 50.000.000	3 Lem	Rp 55.000.000	3 Lem	Rp 55.000.000	3 Lem	Rp 55.000.000	12 Lem	Rp 215.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organis asi MUI)	-	1 Dok NPHD	Rp 50.000.000	1 Dok NPHD	Rp 50.000.000	1 Dok NPHD	Rp 50.000.000	1 Dok NPHD	Rp 55.000.000	4 Dok NPHD	Rp 205.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organis asi Rumah Ibadah)	-	2 Dok NPHD	Rp 100.000.000	2 Dok NPHD	Rp 200.000.000	2 Dok NPHD	Rp 200.000.000	2 Dok NPHD	Rp 210.000.000	8 Dok NPHD	Rp 710.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organis asi GMT KPWK)	-	4 Dok NPHD	Rp 150.000.000	4 Dok NPHD	Rp 100.000.000	4 Dok NPHD	Rp 100.000.000	4 Dok NPHD	Rp 100.000.000	16 Dok NPHD	Rp 450.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bersifat Umum : kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan)	-	50 Kelomp ok	Rp 500.000.000	50 Kelompo k	Rp 470.000.000	50 Kelompok	Rp 480.000.000	50 Kelompo k	Rp 490.000.000	200 Kelompok	Rp 1.940.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan danCapaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Komisi AIDS)	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	Rp 233.500.000	1 Dok NPHD	Rp 250.000.000	1 Dok NPHD	Rp 250.000.000	1 Dok NPHD	Rp 260.000.000	4 Dok NPHD	Rp 993.500.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
			SUB KEGIATAN :	2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	-	75 Org	Rp 200.000.000	75 Org	Rp 200.000.000	75 Org	Rp 200.000.000	75 Org	Rp 200.000.000	300 Org	Rp 800.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

					Masyarakat	Pemberian Bantuan Beasiswa dan Pendampingan Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa	345 Orang	500 Org	Rp 2.000.000.000	500 Org	Rp 2.000.000.000	500 Org	Rp 2.060.000.000	500 Org	Rp 2.080.000.000	2000 Org	Rp 8.140.000.000	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Beasiswa Gelar Sarjana S1	-	-	-	25 Org	Rp -	50 Org	Rp -	75 Orang	Rp -	100 Org	Rp -	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Beasiswa Non Gelar untuk SMA yang lanjut Kuliah	-	-	-	20 Org	Rp -	25 Org	Rp -	30 Orang	Rp -	35 Org	Rp -	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Beasiswa Riset untuk Mahasiswa Tingkat Akhir	-	-	-	10 Org	Rp -	20 Org	Rp -	30 Orang	Rp -	40 Org	Rp -	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Sosialisasi Beasiswa pada seluruh SMA-SMA di Kabupaten Rote Ndao dan Universitas-Universitas di Kupang (NTT)	-	-	-	20 kali	Rp -	25 Kali	Rp -	30 Kali	Rp -	35 Kali	Rp -	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO
						Jumlah		Rp	5.386.666.450		Rp 10.931.761.000		Rp 10.666.293.000		Rp 6.510.825.200		Rp 33.495.545.650	Bagian Pemkesra	KAB. ROTE NDAO

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
2.	Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao periode tahun yang sama. Rencana strategis ini disampaikan sebagai acuan bagi Bagian Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan program – program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Rencana strategis ini akan dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai aspek yang diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maupun berbagai isu strategis yang berkembang baik di tingkat Nasional maupun pada tingkat Propinsi serta di tingkat Kabupaten. Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja dan disusun berdasarkan pendapatan kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian rencana strategis ini disusun sebagai alat manajemen strategis Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, namun dilain pihak keberhasilan implementasi rencana strategis ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kreatifitas pihak-pihak yang menggunakannya sebagai acuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 30 November 2021

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Rote Ndao,



Albeniaftes J. P. Siokain, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19850624 200312 1 001